

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan Indonesia merupakan salah satu hutan tropis di dunia dan ditempatkan pada urutan kedua dalam hal tingkat keanekaragaman hayatinya dan ditempatkan di urutan ketiga sebagai salah satu hutan tropis terluas setelah Brazil dan Republik Demokrasi Kongo. Menurut Wirendro dalam Forest Watch Indonesia (2009: 5) menyebutkan bahwa luas tutupan lahan hutan Indonesia Tahun 2009 mencapai 88,17 juta Ha atau sekitar 46,33 % dari luas daratan Indonesia. Namun dari tahun ke tahun luas hutan Indonesia mengalami penurunan akibat perambahan. Masalah perambahan hutan terjadi di beberapa wilayah seperti Pulau Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi dan Jawa terutama Jawa Barat.

Menurut data yang diterbitkan dalam jurnal *Global Change Biology* perambahan yang terjadi mencapai 8,8 juta ha hutan tropis dalam satu dekade antara tahun 2000 dan 2010. Pulau Kalimantan, yang terbagi antara Indonesia, Malaysia dan Brunei, luas area yang hilang mencapai 5 juta ha atau sekitar 12 % dari tutupan hutan tahun 2000. Namun, kecepatan kemusnahan hutan yang tertinggi terjadi di Sumatera, yang terpapas sekitar 23.7% dari luas tutupan hutan atau sekitar 3.5 juta Ha.

Pada saat ini keberadaan hutan di Jawa Barat telah mengalami gangguan-gangguan khususnya di Kabupaten Bandung dari luas hutan sebesar 89.331,190 Ha telah mengalami penyusutan sebesar 16.613 Ha. Kerusakan ini akibat dari adanya perambahan oleh penduduk yang ada sekitar hutan. Pada tahun 2001 tercatat sebanyak 38.474 KK yang melakukan perambahan hutan. Salah satu daerah di Kabupaten Bandung yang mengalami perambahan hutan adalah Kecamatan Pangalengan.

Fakta menyebutkan tingkat perambahan hutan yang tinggi di Pangalengan disebabkan oleh rendahnya tingkat ekonomi masyarakat, sebagian penduduk belum

Dea Indriani Fauzia, 2013

Respon Petani Terhadap Implementasi Kebijakan Alih Komoditas Sayuran Menjadi Kopi Pada Lahan Kehutanan Di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

mendapatkan pekerjaan ditambah lagi dengan tingkat pengetahuan yang terbatas mengenai kelestarian alam, menyebabkan penebangan kayu secara ilegal terus terjadi. Menurut Dyah (2006: 2) menyebutkan bahwa

“berdasarkan data Perum Perhutani sampai dengan Maret 2006 akibat tekanan masyarakat terhadap hutan yang tinggi, maka jumlah perambahan hutan di Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan BKPH Pangalengan adalah 2.673,47 Ha dari luas hutan yang hampir mencapai 10.000 Ha oleh 3.820 KK”.

Kecamatan Pangalengan merupakan salah satu daerah di Kabupaten Bandung yang memiliki ketinggian di atas 1200 dpl. Sehingga daerah ini sangat cocok dijadikan sebagai lahan pertanian terutama komoditas sayuran. Sehingga mayoritas penduduk di daerah ini bermata pencaharian sebagai petani. Hasil pertanian di daerah ini menjadi sektor utama ekonomi penduduk di daerah Pangalengan. Namun semakin tingginya jumlah penduduk di kecamatan ini mengakibatkan lahan menjadi semakin sempit. Hal ini mengakibatkan banyaknya masyarakat yang menggunakan lahan yang masih tersedia untuk dijadikan lahan pertanian yaitu lahan hutan.

Melihat semakin luasnya lahan hutan yang berkurang dan menyadari bahwa tidak mungkin melakukan penghijauan atau penyelamatan lingkungan dilakukan tanpa menimbang faktor ekonomi masyarakat, akhirnya pemerintah melalui dinas Perhutani berinisiatif mengembalikan fungsi hutan seperti semula sebagai pencegah erosi, banjir, serta penyedia air dan udara melalui tanaman yang berekonomi tinggi tetapi juga dapat hidup dan berproduksi di bawah naungan pohon, sehingga memutuskan pengalihan komoditas dari sayuran menjadi kopi.

Pada tanggal 20 Mei 2003 diterbitkanlah Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 522/1224/Binprod tentang penutupan tumpang sari sayuran, maka dengan sendirinya masyarakat sepakat untuk menghentikan tumpang sari, hal ini untuk membantu konservasi lahan. Masyarakat kemudian memutuskan mengganti tanaman mereka yang semula sayuran menjadi kopi. Selain itu untuk tanaman alih komoditas diperkuat oleh SK. Direksi No. 136 tentang PHBM Tahun 2001 yaitu Pengelolaan

Dea Indriani Fauzia, 2013

Respon Petani Terhadap Implementasi Kebijakan Alih Komoditas Sayuran Menjadi Kopi Pada Lahan Kehutanan Di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Hutan Bersama Masyarakat dengan tanaman pokoknya adalah kopi.

Sejauh ini lebih dari 400 ha areal penanaman kopi diusahakan melalui Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHMB) di Jawa Barat, terutama di wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bandung Selatan sekitar 326,25 Ha dan diikuti oleh KPH Bandung Utara sekitar 51,75 Ha dan KPH Tasikmalaya 22 Ha. Pengembangan utama PHMB tanaman kopi dilakukan di KPH Bandung Selatan, dengan areal mayoritas di Kecamatan Pangalengan.

Kebijakan mengenai alih komoditas di Kecamatan Pangalengan di mulai sejak tahun 2003. Namun kebijakan tersebut tidak disertai dengan pelatihan dan penyuluhan tentang tanaman kopi kepada seluruh petani. Oleh sebab itu para petani banyak menemui kendala terhadap kebijakan tersebut karena panen kopi yang dirasa cukup lama yaitu 1-2 kali pertahun serta cara budidaya kopi yang masih belum sepenuhnya dipahami oleh para petani. Dari permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Respon Petani Terhadap Implementasi Kebijakan Alih Komoditas Sayuran Menjadi Kopi Pada Lahan Kehutanan Di Kecamatan Pangalengan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi sosial ekonomi petani yang terkena implementasi alih komoditas sayuran menjadi kopi pada lahan kehutanan di Kecamatan Pangalengan?
2. Bagaimana implementasi kebijakan alih komoditas sayuran menjadi kopi pada lahan kehutanan di Kecamatan Pangalengan?
3. Bagaimana respon petani terhadap alih komoditas sayuran menjadi kopi pada lahan kehutanan di Kecamatan Pangalengan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan kondisi sosial ekonomi petani yang terkena implementasi alih komoditas sayuran menjadi kopi pada lahan kehutanan di Kecamatan Pangalengan
2. Menidentifikasi pelaksanaan implementasi kebijakan alih komoditas sayuran menjadi kopi pada lahan kehutanan di Kecamatan Pangalengan

Dea Indriani Fauzia, 2013

Respon Petani Terhadap Implementasi Kebijakan Alih Komoditas Sayuran Menjadi Kopi Pada Lahan Kehutanan Di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

3. Mendeskripsikan respon petani terhadap alih komoditas sayuran menjadi kopi pada lahan kehutanan di Kecamatan Pangalengan

D. Manfaat Penelitian

1. Diperoleh informasi mengenai kondisi sosial ekonomi petani yang terkena implementasi alih komoditas sayuran menjadi kopi pada lahan kehutanan di Kecamatan Pangalengan
2. Diperoleh informasi mengenai pelaksanaan implementasi kebijakan alih komoditas sayuran menjadi kopi pada lahan kehutanan di Kecamatan Pangalengan
3. Diperoleh informasi mengenai respon petani terhadap alih komoditas sayuran menjadi kopi pada lahan kehutanan di Kecamatan Pangalengan
4. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Definisi Operasional

1. Respon Petani

Menurut Feby Nurliana (2008: 7) menyatakan bahwa “respon adalah sebagai bentuk pengamatan dan penilaian seseorang melalui panca indera terhadap semua hal disekitarnya”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa respon petani adalah bentuk penilaian oleh petani sebagai pelaku pertanian terhadap adanya kebijakan baru oleh pemerintah mengenai pengalihan komoditas dari penanaman sayuran menjadi kopi. Dapat ditunjukkan dengan tanggapan atau sikap, setelah itu akan memunculkan suatu partisipasi baik dalam bentuk ide/gagasan, harta maupun tenaga.

Berdasarkan pengertian respon di atas dapat disimpulkan bahwa indikator dari respon adalah senang atau positif dan tidak senang atau negatif. Untuk klasifikasinya respon terbagi menjadi sangat setuju, setuju, kurang setuju dan tidak setuju

2. Kebijakan Alih Komoditas

Secara harfiah kebijakan adalah terjemahan langsung dari kata *policy*. Kata *policy* diartikan sebagai sebuah rencana kegiatan atau pernyataan mengenai tujuan

Dea Indriani Fauzia, 2013

Respon Petani Terhadap Implementasi Kebijakan Alih Komoditas Sayuran Menjadi Kopi Pada Lahan Kehutanan Di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- tujuan, yang diajukan atau diadopsi oleh suatu pemerintahan, partai politik, dan lain-lain.

Dalam penelitian ini kebijakan alih komoditas adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan cara perubahan atau pengalihan jenis tanaman. Kebijakan alih komoditas ini dilakukan sebagai bentuk pelestarian kembali lahan hutan agar tersebut bisa ditanami oleh tanaman yang bisa hidup dan berproduksi di bawah naungan pohon.

3. Lahan Kehutanan

Menurut FAO dalam Irsyad (1989: 207) lahan adalah suatu wilayah dipermukaan bumi yang mempunyai sifat-sifat dari biosfer secara vertikal di atas maupun di bawah wilayah tersebut termasuk atmosfer, geologi, geomorfologi, hidrologi, vegetasi dan binatang yang merupakan hasil aktivitas manusia dari masa lampau maupun masa sekarang.

Pada penelitian ini yang dimaksud adalah lahan kehutanan milik Perhutani. Dimana penanaman kopi sebagai alih komoditas ditumpangsarikan bersama pohon-pohon. Sehingga lahan yang tadinya kritis akibat dijadikan lahan pertanian dikembalikan lagi kepada fungsi awalnya yaitu lahan kehutanan.